



Pemetaan dan Sinergitas Kelembagaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Branjang Sebagai Desa Wisata Rintisan

Gana Wuntu¹, Pranoto², Mukhamad Kholil Aswan³
STIEPARI Semarang, Kompleks Bendan Ngisor Semarang

E-mail: ganawuntu1@gmail.com

Abstrak

Perekonomian dan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dalam pembangunan pariwisata sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Sedangkan UU no. 6 Tahun 2015 tentang Desa menyebutkan bahwa Dana Desa merupakan instrumen strategis untuk mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan dua hal tersebut, maka pengelolaan potensi wisata harus dilakukan dengan menggerakkan simpul-simpul kekuatan desa, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia melalui pengaturan pemerintah desa yang jelas dan berorientasi pada kemakmuran masyarakat desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang - orang yang diwawancarai Data diperoleh dengan menggunakan teknik sampling purposive yang mana penelitian menentukan kriteria mengenai responden mana yang akan dipilih sebagai sampel dan dianggap mewakili dari responden lainnya sesuai dengan lembaga/ organisasi dan masyarakat dengan melakukan wawancara kepada kepala desa dan pengurus lembaga BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) untuk mendapatkan data yang di perlukan.

Kata kunci: Potensi; Regulasi; Ekonomi; Pembangunan

Mapping And Institutional Synergy Through Community Empowerment In Branjang Village As A Tourism Partnership Village

Abstract

The economy and community welfare are the ultimate goals in tourism development as mandated in the Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 2009 concerning Tourism. While Law no. 6 of 2015 concerning Villages states that the Village Fund is a strategic instrument to encourage community development and empowerment. The management of tourism potential must be carried out by moving village power nodes, both natural resources and human resources through clear village government arrangements and oriented towards the prosperity of village communities. The method used in this study uses qualitative research methods. namely research that uses descriptive data in the form of written and spoken words from the people interviewed. The data is obtained using a purposive sampling technique in which the research determines the criteria regarding which respondents will be selected as samples and are considered to represent other respondents according to the institution/ organizations and the community by conducting interviews with village heads and BUMDES institution administrators (Village Owned Enterprises) to obtain the necessary data.

Keywords: Potency; Regulation; Economy; Development

Pemetaan dan Sinergitas Kelembagaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Branjang Sebagai Desa Wisata Rintisan

Pendahuluan

Setiap daerah/ desa memiliki ciri khas dan kekuatan potensi wisata yang berbeda, tidak ada desa yang identik baik dari aspek ekonomi, sosial, alam dan budaya dengan mengemas suatu pedesaan menjadi desa wisata (Trisnawati et al., 2018), Desa merupakan satuan pemerintahan terbawah yang memiliki peranan penting dalam perekonomian bangsa. Sebagian besar masyarakat di Indonesia tinggal di desa, sehingga tonggak perekonomian yang kuat hendaknya dibangun dari tingkat desa untuk mewujudkan kemandirian desa dan peningkatan ekonomi masyarakat. (Suranny, 2020) Untuk tercapainya tujuan pembangunan desa wisata tersebut, maka pengelolaan dan pembangunan desa wisata dilakukan dengan menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat baik secara individu maupun kelompok (Haniek Listyorini, 2022). Konsep pemberdayaan masyarakat ini merupakan suatu proses pembangunan yang bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya setempat sebaik mungkin (Shifa & Ilyas, 2021).

Pemerintah Desa Branjang, Kabupaten Semarang berkeinginan agar masyarakatnya dapat merasakan manfaat dengan adanya kebijakan pemerintah untuk memanfaatkan potensi unggulan daerahnya melalui kegiatan ekonomi sebagai suatu desa wisata rintisan (Listyorini et al., 2021). Hal tersebut diwujudkan dengan pembentukan pengelola desa wisata dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) sebagai penggerak rintisan untuk menjadi sebuah desa wisata. Keberadaan Pokdarwis Desa Branjang saat ini pengelolaannya masih belum optimal utamanya untuk pelibatan masyarakat dalam pemanfaatan potensi wisata lokal (Irdansyah & Meiyani, 2018).

Sementara itu, adanya kelembagaan lain seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Pengelola Desa Wisata di Desa Branjang secara manajemen berjalan sendiri-sendiri secara terpisah dan belum mendukung belum bersinergi dalam untuk menjadikan Desa Branjang sebagai desa wisata rintisan (Sofyani et al., 2019). Model pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan kepala desa adalah organisasi pengelola desa wisata dengan memanfaatkan aset milik desa untuk kegiatan wisata, sementara Pokdarwis sebagai kelompok masyarakat yang menyediakan unit-unit layanan wisata dari aset milik masyarakat (Asmoro & Da'awi, 2020).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang - orang yang diwawancarai.

Data diperoleh dengan menggunakan teknik sampling purposive (penelitian menentukan kriteria mengenai responden mana yang akan dipilih sebagai sampel dan dianggap mewakili dari responden lainnya sesuai dengan lembaga/organisasi dan masyarakat). Dengan mewawancarai Bapak Teguh selaku Ketua Pengelola Desa Wisata, dan Pak Musatakin selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata, masyarakat dan UMKM setempat, pengurus BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) dan metode yang digunakan ini adalah metode survey dengan pendekatan kualitatif (Mazlan et al., 2021).

Hasil Dan Pembahasan

Desa Branjang merupakan sebuah Desa yang terletak di Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kepala Desa Branjang yaitu sebuah Desa yang akan

Pemetaan dan Sinergitas Kelembagaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Branjang Sebagai Desa Wisata Rintisan

dijadikan sebagai Desa Wisata rintisan karena memiliki potensi wisata yang beraneka ragam, baik alam, budaya maupun buatan.

Dari pemetaan awal, Desa Wisata Branjang sudah terdapat berdiri beberapa lembaga yaitu : Pengelola Desa Wisata, Lembaga Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Kelompok Sadar Wisata. Model yang saat ini digunakan oleh kepala desa adalah model pemberdayaan masyarakat dalam bentuk organisasi pengelola desa wisata dapat memanfaatkan aset milik desa untuk kegiatan wisata dan melayani paket-paket wisata yang menyediakan unit-unit layanan wisata dari aset milik masyarakat. Hal ini peran Kelompok Sadar Wisata dan Badan Usaha Milik Desa serta Lembaga Permusyawaratan Desa juga berjalan dengan apa adanya, sehingga terjadi kerancuan dalam tugas dan fungsinya.

Disamping itu adanya beberapa kelompok usaha masyarakat di Desa Branjang yang apabila diberdayakan dan bersinergi akan menjadi potensi namun belum ada pelibatannya dalam pengelolaan desa wisata rintisan sehingga belum memberikan manfaat dalam pembangunan kepariwisataan dan masih diperlukan upaya penataan organisasi. Sehingga hasil penelitian ini dapat lebih memfokuskan kepada pembagian peran masing-masing lembaga dan mensinergikannya.

Kelembagaan

Pengembangan Desa Wisata dipengaruhi oleh aspek kelembagaan daya tarik wisata, dan infrastruktur (Darwita & Redana, 2018) melalui aspek-aspek di atas akan memberikan kontribusi dalam pelayanan, kualitas produk wisata dan kuantitas produk (Nardin, 2019) dan harus didukung oleh masyarakat agar terarah dan berkelanjutan.

Kelembagaan adalah komponen penting dalam keberhasilan pariwisata (Trisnawati et al., 2018). Kelembagaan berperan dalam mengatur sumberdaya & distribusi manfaat dalam upaya peningkatan potensi pariwisata (Triambodo & Damanik, 2015). Sangat penting dalam fasilitasi, dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam sektor pariwisata.

Desa Branjang sebagai Desa Rintisan sudah membentuk beberapa lembaga/ unsur yaitu:

- a. Pemerintah Desa diampu oleh Kepala Desa yaitu Bapak Suhardi, SE
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan ketua Bapak Zamroni;
- c. Pengelola Desa Wisata, dengan ketua Bapak Teguh Basuki.
- d. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dengan ketua Pak Mustaqim.

Saat ini pembagian tugas pokok dan fungsinya masih sangat sederhana belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan desa sebagai desa wisata yaitu bahwa asser desa yang menjadi atraksi wisata, amenities maupun aksesibilitas akan dikelola oleh Pokdarwis. Peran pengelola desa wisata adalah membuat paket-paket wisata dengan menggunakan aset desa maupun aset warga.

Dalam hal pengelolaan dan pelaksanaan serta menentukan kebijakan dalam mengembangkan desa wisata belum ada pelibatan masyarakat dan kerjasama dengan Badan Permusyawaratan Desa dan memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa untuk memanfaatkan aset desa untuk pariwisata.

Pembagian Peran

Dalam kesepakatan yang tidak tertulis oleh Pemerintah Desa Branjang telah disepakati beberapa hal dalam pembagian peran yaitu bahwa pengelola desa wisata

Pemetaan dan Sinergitas Kelembagaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Branjang Sebagai Desa Wisata Rintisan

memiliki 3 tim yang bertanggungjawab dalam atraksi, pembuatan paket dan promosi serta penjualan.

Kesepakatan pembagian tugas, fungsi dan masing-masing kelembagaan, antara lain sebagai berikut:

- a. Pokdarwis mengelola dan mengkoordinie aset wisata yang dimiliki oleh warga masyarakat;
- b. BUMDES mengelola dan mengkoordinir aset wisata yang dimiliki oleh pemerintah desa;
- c. Pengelola Desa Wisata memanfaatkan baik aset maupun aset BUMDES untuk menjadi sajian atraksi, paket dan promosi wisata bagi calon pengunjung.

Permasalahan dan Faktor Penghambat

Permasalahan kelembagaan yang dapat dilihat di Desa Branjang sebagai desa wisata rintisan, yaitu:

- a. Perrmusyawaratan Desa dan Lembaga lainnya belum berjalan baik dan belum ada sinergi;
- b. Belum ada strategi kepemimpinan, perencanaan program, manajemen dan pelaksanaan, alokasi sumber daya dan hubungan dengan pihak luar;
- c. Kapasitas kelembagaan masih belum mampu menciptakan organisasi yang tepat guna untuk pengembangan desa wisata.

Model penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Desa Branjang menjadi desa wisata rintisan belum ada pelibatan masyarakat.

Simpulan

Dari hasil penelitian ni penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk menjadikan Desa Branjang sebagai Desa wisata rintisan memiliki banyak keragama potensi baik alam, budaya dan buatan serta sudah mampu membentuk beberapa kelembagaan sebagai suatu kekuatan dan peluang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kapasitas kelembagaan di Desa Branjang harus ditingkatkan, disinergikan sehingga mampu menciptakan organiasi/lembaga yang tepat guna dan saling sinergi untuk mewujudkan desa wsata rintisan melalui pelibatan masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, terutama support dari dosen pembimbing, dan juga tim penyusun jurnal HUMMANSI, sehingga kegiatan penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Daftar Pustaka

- Asmoro, B. T. (2020). Revitalisasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Sukodono, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang Dalam Pengelolaan Obyek Wisata Coban Pandawa. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 5(1).
- Darwita, I. K. (2018). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 9(1).

Pemetaan dan Sinergitas Kelembagaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Branjang Sebagai Desa Wisata Rintisan

- Fuskhah, E. K. (2018). Upaya Pemanfaatan Sumberdaya Pedesaan Berbasis Pengembangan Kelompok Peternak Melalui Pengolahan Limbah Kotoran Menjadi Produk Energi Terbarukan Dan Produk Yang Bernanfaat Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Branjang Kabupaten Semarang. *Abdimas Unwahas*, 3(1).
- Haniek Listyorini, N. M. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembuatan Tema Ikonik, Acara Wisata, Dan Usaha Ekonomi Kreatif. *Jurnal Masyarakat Mandiri*.
- Irdansyah, I. &. (2018). Rekonstruksi Sosial Ekonomi (Studi Bumdes Sebagai Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Sangiang Kabupaten Bima. *Jurnal Pendidikan*, 6(2).
- Listyorini, H. S. (2021). Penguatan Kelembagaan Pokdarwis Dalam Merintis Desa Wisata Melalui Penciptaan Identitas dan Kapabilitas Perencanaan Organisasi. *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 5(2).
- Mazlan, M. I. (2021). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kabupaten Sinjai. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, 2(2).
- Nardin, Y. (2019). Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Bumdes. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(3).
- Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Usm Law Review*, 2(2).
- Shifa, I. N. (2021). Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa. *Jendela Pls*, 5(2).
- Sofyani, H. A. (2019). Success Factors of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Performance in Indonesia: An Exploratory Study. *Journal of Accounting and Investment*, 20(2).
- Suharto, S. (2021). Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Implementasi Undang-Undang Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(1).
- Suranny, L. E. (2020). Pengembangan Potensi Desa Wisata Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Perdesaan Di Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 49–62.
- Trisnawati, A. E. (2018). Pengembangan Desa Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 3(1).
- Udsholt, L. (2011). Capacity Development in Practice. *Development in Practice*. 21(3).
- Umam, C. P. (2020). Pemberdayaan Pokdarwis Tazgk Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Kaduengang. Sawala . *Jurnal Pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa Dan Masyarakat*, 1(1).

***Pemetaan dan Sinergitas Kelembagaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa
Branjang Sebagai Desa Wisata Rintisan***